

BAB I

PENDAHULUAN

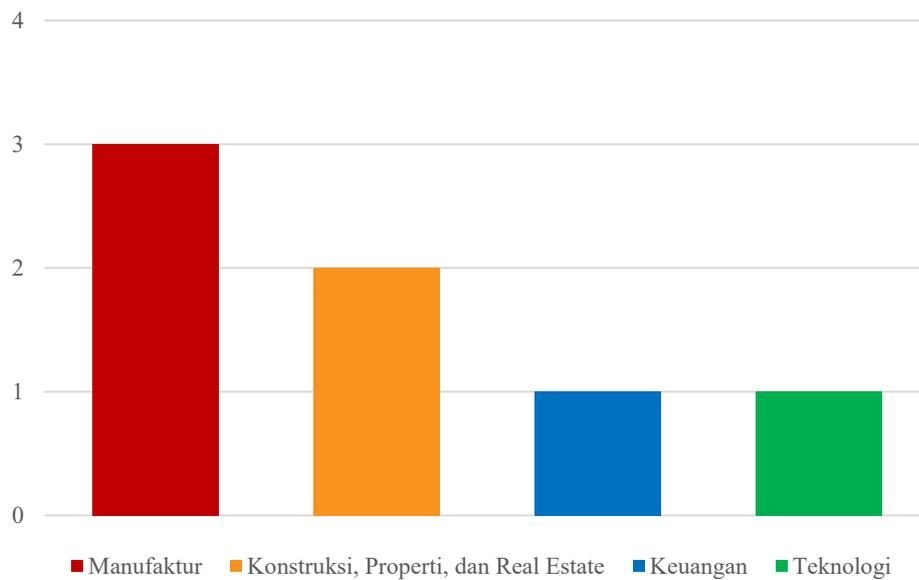
1.1 Latar Belakang Masalah

Maraknya praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode 2020–2024 menimbulkan kekhawatiran terhadap keandalan laporan keuangan. Fenomena ini mengindikasikan adanya celah pengawasan yang belum optimal dan memperkuat urgensi dilakukannya penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut. Pengungkapan informasi dalam perusahaan tercermin melalui laporan keuangan, yang tidak hanya berfungsi sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik modal, tetapi juga sebagai media komunikasi yang efektif mengenai kinerja dan prospek perusahaan di masa depan. Menurut PSAK No. 1, laporan keuangan adalah dokumen penting yang menyajikan informasi berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan adalah laporan laba rugi karena menyajikan informasi tentang laba yang krusial bagi pengguna ekonomi (Zulkarnain & Helmayunita, 2021).

Pentingnya integritas laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi tidak dapat diabaikan. Data laba membantu pemegang saham memprediksi *earning power* perusahaan di masa depan dan berfungsi sebagai indikator seberapa baik kinerja akuntabilitas manajemen dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan (Wayan et al., 2021). Laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi memberikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak bias yang

sangat penting bagi para investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Laporan keuangan yang tidak memiliki transparansi dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laba, sehingga merugikan investor dalam menilai kinerja perusahaan (Challen & Noermansyah, 2023). Integritas laporan keuangan memastikan bahwa informasi yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Namun, fenomena praktik manajemen laba di perusahaan manufaktur menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga integritas laporan keuangan.

Manajemen mempunyai keleluasaan dalam menentukan metode akuntansi yang berkaitan dengan prinsip GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*), sehingga berpotensi memunculkan manajemen laba. Upaya manajemen untuk mengubah atau memanipulasi hasil dalam proses pelaporan keuangan, baik melalui penerapan metode akuntansi tertentu, penyesuaian waktu pengakuan pendapatan dan beban, maupun strategi lainnya, dengan tujuan mempengaruhi angka laba yang dilaporkan dalam jangka pendek (Yahaya et al., 2020). Praktik manajemen laba dapat merusak keandalan pelaporan keuangan dengan mengaburkan transparansi dan objektivitas informasi yang disajikan, sehingga meningkatkan kemungkinan para pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang keliru mengenai kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya (Zulkarnain & Helmayunita, 2021).



Gambar 1.1
Kasus Manajemen Laba Selama Periode 2020-2024
(Sumber: Hasil Pengamatan Sendiri, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.1 yang mengilustrasikan kasus-kasus manajemen laba pada periode 2020-2024 mencerminkan fenomena kompleks di mana perusahaan menggunakan berbagai teknik seperti penggelembungan pendapatan, manipulasi piutang, dan perubahan estimasi akuntansi. Tekanan finansial akibat peningkatan *leverage* seringkali mendorong manajer untuk melakukan rekayasa laba guna menjaga kinerja laporan keuangan yang menarik bagi investor (Falah & Ramadani, 2024). Pada periode 2020–2024, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menghadapi berbagai dinamika ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 dan ketidakpastian pasar global. Tekanan untuk mempertahankan profitabilitas dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu membuka celah bagi manajemen untuk memanfaatkan keleluasaan penerapan prinsip-prinsip akuntansi, sehingga mendorong praktik manajemen laba. Di tengah tekanan tersebut, manajemen kerap dihadapkan pada dilema antara mempertahankan kinerja jangka pendek dan menjaga integritas laporan keuangan

(Ramdhanti & Indrati, 2022). Insentif bonus kinerja mendorong manajer merekayasa laba demi memenuhi harapan pemegang saham dan kreditur.

Sektor manufaktur memiliki karakteristik produksi dan rantai pasokan yang rumit sehingga memberikan peluang lebih besar bagi manajer untuk memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan akuntansi. Keterbatasan sistem pengawasan internal yang tidak optimal memberikan peluang bagi manajemen untuk mengambil keputusan akuntansi secara *diskresioner*. Selain itu, fleksibilitas dalam penerapan standar akuntansi memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laba, terutama ketika terdapat konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal) sesuai dengan perspektif *agency theory* (Anggreni et al., 2022). Asimetri informasi memicu konflik antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal), sehingga mendorong praktik manipulasi laba.

Dalam konteks kompleksitas dan kelemahan pengawasan di sektor manufaktur tersebut, teori akuntansi positif menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana manajer didorong oleh insentif oportunistik. Melalui tiga hipotesis utamanya, *bonus plan hypothesis*, *debt covenant hypothesis*, dan *political cost hypothesis* (Indriani & Pujiono, 2021). Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa fleksibilitas dalam penerapan standar akuntansi justru dimanfaatkan untuk melakukan manajemen laba. Dengan demikian, praktik manipulasi laba yang sistemik pada perusahaan manufaktur periode 2020–2024 dapat dipahami sebagai manifestasi pemilihan kebijakan akuntansi yang menguntungkan manajer sesuai kondisi *leverage* dan efektivitas mekanisme *Good Corporate Governance* yang ada.

Manajemen laba yang dilakukan dapat berupa *income increasing* atau *income decreasing*, tergantung dari kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Praktik manajemen laba sering kali diterapkan dengan tujuan menaikkan laba (*income increasing*) ketika perusahaan mengalami penurunan performa keuangan, sebagai upaya untuk mempertahankan persepsi positif di mata *stakeholder*. Berbeda dengan pelaporan keuangan kepada pihak eksternal, dalam penyusunan laporan pajak perusahaan cenderung menerapkan strategi manajemen laba yang menurunkan laba (*income decreasing*) untuk mengurangi beban pajak. Beberapa pendekatan yang umum digunakan oleh manajemen mencakup penggunaan estimasi akuntansi secara fleksibel, perubahan kebijakan akuntansi, serta pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Permasalahan ini sulit untuk dihindari karena menyangkut adanya keuntungan individu dan keuntungan perusahaan. Manajemen laba kerap dimanfaatkan oleh manajer sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka, khususnya dengan menyesuaikan angka laba yang dilaporkan guna membentuk persepsi *stakeholder* sesuai dengan tujuan individu yang ingin dicapai (Ariani & Yudiantara, 2023).

Evaluasi atas jumlah laba yang dihasilkan perusahaan menjadi indikator penting dalam memperkirakan potensi *return investasi*. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen dapat memiliki tujuan yang bervariasi, baik yang bersifat positif seperti meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor, maupun yang bersifat oportunistik untuk kepentingan pribadi (Wayan et al., 2021). Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal sering kali menimbulkan konflik keagenan, terutama karena pemegang saham yang menanggung dampak dari keputusan manajerial. Konflik ini semakin diperparah oleh adanya asimetri informasi, di mana

manajer memiliki akses yang lebih luas terhadap data internal perusahaan, sehingga membatasi kemampuan pihak eksternal dalam melakukan pengawasan secara optimal (Zulkarnain & Helmayunita, 2021). Ketimpangan informasi ini memberikan peluang bagi manajer untuk melakukan manipulasi laba demi mencapai target tertentu, seperti memperoleh bonus, menghindari biaya politik, atau memenuhi perjanjian hutang. Dengan demikian, praktik manajemen laba kerap kali muncul sebagai bentuk perilaku oportunistik yang dipicu oleh insentif pribadi di tengah lemahnya pengawasan terhadap manajemen (Martadinata, 2022).

Praktik manajemen laba masih menjadi isu yang relevan dalam lingkup perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik manajemen laba pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik dan menjadi kendala yang menghambat aliran dana di pasar modal (Purnamawati & Hatane, 2022). Praktik manajemen laba sering kali dilakukan untuk meningkatkan citra keuangan perusahaan, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal dari investor dan kreditur (Ramdhanti & Indrati, 2022). Oleh karena itu, penguatan mekanisme *Good Corporate Governance* menjadi faktor penting dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan dan mengurangi risiko distorsi informasi bagi pemegang saham. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pelanggaran pelaporan keuangan serta praktik manipulasi laba di sejumlah perusahaan yang terjadi di Indonesia dan luar negeri. Berdasarkan temuan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hasan Basri, terdapat indikasi adanya penyimpangan dalam perhitungan akuntansi pada beberapa laporan keuangan, yang mengindikasikan bahwa laba yang dilaporkan kerap kali melebihi laba aktual. Temuan ini mendukung adanya praktik rekayasa

laba yang dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja tertentu. (Suheny, 2019).

Sejumlah perusahaan besar telah terlibat dalam masalah manajemen laba di Indonesia. Kejadian ini terjadi pada tahun 2021 di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), sebuah perusahaan yang memproduksi barang konsumsi dan beroperasi melalui sejumlah gerai yang mengkhususkan diri pada penjualan beras. Berdasarkan informasi dari PT Ernst & Young Indonesia (EY) dan penelusuran terkini. Pada tanggal 12 Maret 2019, penelusuran terhadap kegiatan operasional manajemen AISA menunjukkan adanya peningkatan persediaan, aset tetap, dan piutang. Menurut dugaan, emiten industri makanan ini menghasilkan Rp 4 triliun uang penggelembungan, Rp 662 miliar pendapatan, dan Rp 329 miliar laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Selain itu, temuan tambahan berasal dari total Rp 1,78 triliun aliran dana melalui berbagai skema Grup AISA yang ditargetkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan manajemen sebelumnya. Hal ini termasuk biaya pembiayaan, pencairan pinjaman bank, pencairan deposito, dan transfer dana melalui rekening bank (Widhiyanto, 2021).

Kasus manipulasi laba lainnya yang melibatkan PT Indofarma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam laporan keuangan kedua perusahaan tersebut. PT Indofarma Tbk diketahui melakukan penggelembungan persediaan, rekayasa transaksi, dan pencatatan fiktif, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 371,8 miliar, serta berujung pada penahanan beberapa eksekutifnya. Disisi lain, PT Kimia Farma Tbk, dugaan manipulasi laporan keuangan terjadi di anak usahanya, PT Kimia Farma Apotek (KFA), yang menyebabkan kerugian sekitar Rp 1,82 triliun selama periode 2021-

2022 (Nursyamsi, 2024). Banyaknya kasus manipulasi laba tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba masih menjadi praktik yang sering terjadi di perusahaan yang terdaftar di BEI. Kasus-kasus ini menegaskan pentingnya transparansi dan tata kelola keuangan yang baik guna menjaga kepercayaan publik dan integritas pasar. Oleh karena itu, perlu diteliti faktor-faktor yang dapat mengurangi kecenderungan praktik ini, seperti *leverage*, dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG).

Leverage mengacu pada sejauh mana suatu perusahaan mengandalkan instrumen dengan imbal hasil tetap, seperti utang dan saham preferen dalam struktur permodalannya (Umah & Sunarto, 2022). Rasio *leverage* digunakan sebagai indikator untuk menilai kecenderungan manajer dalam melakukan manajemen laba, terutama sebagai strategi untuk meningkatkan profitabilitas yang dilaporkan. Proporsi hutang yang lebih besar dibandingkan dengan modal perusahaan dapat berdampak signifikan terhadap penilaian oleh pihak eksternal atau kreditur. Tingginya rasio hutang terhadap modal mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan upaya manajemen laba (Purnamawati & Hatane, 2022). Tingginya tingkat *leverage* berkaitan erat dengan meningkatnya risiko kesulitan keuangan, yang mendorong manajemen untuk melakukan praktik manipulasi laba guna memperkuat citra keuangan perusahaan dan menarik kepercayaan investor (Suheny, 2019).

Leverage merujuk pada sejauh mana perusahaan memanfaatkan dana pinjaman untuk mendukung perolehan aset dan menjaga kelangsungan aktivitas operasionalnya. Dalam kondisi kebangkrutan, ekuitas pemegang saham menjadi prioritas utama untuk menutup kewajiban, sehingga struktur permodalan yang kuat dinilai lebih menarik oleh investor. Sebaliknya, tingginya proporsi hutang sering

dianggap menandakan ketidakstabilan finansial. Untuk mempertahankan citra positif, perusahaan dengan *leverage* tinggi terkadang memanfaatkan manajemen laba melalui hutang guna menampilkan kinerja yang lebih stabil. Penelitian yang dilakukan oleh (Fionita & Fitra, 2021), (Sari et al., 2021), (Umah & Sunarto, 2022) menemukan bahwa variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil tersebut berbeda dengan temuan (Suheny, 2019), (Lubis & Fajriana, 2023), (Astawa & Sinarwati, 2024), (Falah & Ramadani, 2024), (Anggraeni et al., 2022) yang mengemukakan bahwa variabel *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Adanya perbedaan hasil dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka pengujian *leverage* terhadap manajemen laba perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan instrumen penting dalam memastikan efektivitas pengawasan terhadap kinerja manajemen serta akuntabilitasnya kepada pemegang saham, yang keseluruhannya berlandaskan pada sistem peraturan yang telah ditetapkan (Savitri & Priantinah, 2019). *World Bank* mendefinisikan *Good Corporate Governance* merupakan suatu kerangka hukum, regulasi, dan prinsip tata kelola yang dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya entitas secara efektif, sehingga mampu menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi para pemegang saham serta masyarakat secara luas. Prinsip-prinsip GCG, seperti *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*, diyakini mampu mengurangi praktik manajemen laba dengan meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen (OECD, 2015). Transparansi memastikan keterbukaan informasi, akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas keputusan, tanggung jawab menjamin kepatuhan

terhadap hukum dan etika, independensi mencegah konflik kepentingan, dan kewajaran menjamin perlakuan adil bagi semua pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan 5 komponen mekanisme *Good Corporate Governance* yang diharapkan mampu mengontrol tindakan Manajemen Laba. Komponen-komponen tersebut yaitu Ukuran Dewan Direksi, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Audit Internal, Komite Audit, Kepemilikan Institusional.

Dewan Direksi berhubungan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi karena dewan direksi bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan dan memastikan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Keberadaan direksi yang mengatur operasional perusahaan juga dapat berfungsi sebagai penanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut seluruh aktivitas perusahaan. Jajaran direksi merupakan mekanisme penting di dalam membatasi kegiatan manajer, pada saat manajer mempunyai tujuan yang berbeda dengan pemilik perusahaan. Namun demikian keberadaan direksi tidak selalu melindungi kepentingan pemegang saham. Penelitian yang dilakukan (Anggreni, dkk., 2022), (Lubis & Fajriana 2023) menemukan bahwa jumlah anggota dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Rinta, 2021), (Fajriana, 2023), (Edi & Jessica, 2020) yang menemukan bahwa jumlah anggota dewan direksi di suatu perusahaan bukan faktor yang mempengaruhi manajemen laba.

Anggota dewan komisaris independen merupakan individu yang tidak memiliki keterikatan pribadi, profesional, maupun finansial dengan pihak manajemen, anggota dewan lainnya, ataupun pemegang saham pengendali, sehingga keputusan yang diambil tetap objektif dan berfokus pada kepentingan

jangka panjang perusahaan. Komisaris independen mempunyai peranan sangat penting dalam menjalankan prinsip *responsibility*, *independineensi*, dan *fairness* di pasar modal. Komisaris independen memiliki peran penting sebagai penengah dalam konflik internal manajerial sekaligus mengawasi keputusan strategis dewan direksi agar tetap selaras dengan prinsip dan etika tata kelola perusahaan yang baik (Zulkarnain & Helmayunita, 2021). Komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan yang kuat terhadap manajemen, secara efektif mengurangi risiko penyajian laporan keuangan yang tidak akurat atau manipulatif. Dengan demikian, dewan komisaris yang sangat kompeten berkontribusi penting dalam mencegah praktik tidak etis dalam pelaporan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Janrosi & Lim, 2019), (Sari et al., 2021), (Challen & Noermansyah, 2023) semakin besar komposisi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan semakin kecilnya tindakan manajemen laba. Namun, berbeda dengan hasil yang ditemukan pada penelitian (Insyaroh & Widiatmoko, 2022), (Ridho & Djamil, 2023), (Purwanti et al., 2021) yang mengemukakan proporsi komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

Audit internal berperan penting dalam mengawasi kinerja manajer serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan akuntansi (Anzelya & Kurniawati, 2020). Audit Internal mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku dan bebas dari kecurangan. Selain mendeteksi dan mencegah penyimpangan laporan keuangan, auditor internal juga berfungsi sebagai pihak independen yang mengawasi aktivitas manajemen (Sari et al., 2023). Auditor internal yang kompeten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan

mengurangi praktik manipulasi oleh manajer (Ghaleb et al., 2020). Meskipun fokus utama audit internal adalah kontrol dan risiko operasional, perannya dalam mendukung komite audit untuk mendeteksi manajemen laba tetap signifikan. Penelitian yang dilakukan (Gheleb, et al, 2020), (Alyaarubi et al., 2021) menemukan bahwa audit internal memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Namun, hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan (Indriswati & Triyanto, 2020), (Anzelya & Kurniawati, 2020) menemukan bahwa audit internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Komite Audit berperan sebagai unit independen yang memberikan masukan strategis kepada dewan komisaris dalam rangka meningkatkan keandalan pelaporan keuangan serta memperkuat efektivitas proses audit, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal (Ramdhanti & Indrati, 2022). Komite audit berfungsi sebagai pendukung dewan direksi dalam melaksanakan tugas pengawasan, khususnya dalam memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dilakukan secara tepat, patuh terhadap ketentuan yang berlaku, serta mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, komite audit berperan sebagai pihak independen yang dapat dipercaya untuk mengawasi praktik manajemen laba dan mencegah potensi manipulasi laporan keuangan. Perusahaan harus memiliki komite audit untuk memastikan bahwa manajemen tidak berbohong tentang status keuangan perusahaan dan untuk mengkonfirmasi kebenaran laporan keuangan (Ramdhanti & Indrati, 2022). Komite audit memiliki peran penting dalam meningkatkan kredibilitas informasi keuangan dengan mendukung dewan komisaris dalam mengawasi penyusunan dan penyajian laporan oleh manajemen. Fungsi pengawasan ini turut memperkuat kepercayaan pengguna terhadap

keandalan laporan keuangan yang disampaikan (Challen & Noermansyah, 2023). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menyatakan bahwa keberadaan komite audit diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan serta berperan dalam mengoptimalkan fungsi *checks and balances*. Peran tersebut pada akhirnya bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pemegang saham maupun pihak berkepentingan lainnya (Suheny, 2019). Penelitian yang dilakukan (Janrosli & Lim, 2019), (Challen & Noermansyah, 2023) menyatakan ukuran anggota komite audit yang lebih besar di suatu perusahaan dapat menurunkan manajemen laba. Namun, hasil yang berbeda dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan (Fionita & Fitra, 2021), (Sari et al, 2021), (Alyaarubi et al., 2021) menyatakan bahwa besar kecilnya ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kepemilikan Institusional memiliki hubungan erat dengan prinsip akuntabilitas dan independensi, karena investor institusional, seperti bank, dana pensiun, atau perusahaan investasi, memiliki kepentingan jangka panjang dalam memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik. Proporsi kepemilikan institusional yang besar umumnya berperan sebagai mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap tindakan manajerial. Tingkat kepemilikan tersebut dapat menekan kecenderungan manajer untuk melakukan praktik manajemen laba (Fionita & Fitra, 2021). Kepemilikan institusional sering dikaitkan dengan peningkatan kualitas laba, karena institusi-institusi tersebut cenderung terdiri atas investor profesional yang mampu mengevaluasi laporan keuangan secara kritis untuk mengidentifikasi dan mengurangi praktik manajemen laba. Dengan pengaruhnya yang besar, investor institusional berada dalam posisi untuk

mendorong manajemen agar menjalankan pelaporan keuangan secara transparan dan sesuai regulasi yang berlaku (Ramdhanti & Indrati, 2022). Semakin tinggi kepemilikan institusionalnya maka semakin rendah tindakan manajemen laba, sejalan dengan temuan empiris sebelumnya (Astawa & Sinarwati, 2024), (Falah & Ramadani, 2024), (Fairus & Sihombing, 2020), (Suheny, 2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Namun, hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan (Janrosl & Lim, 2019), (Fionita & Fitra, 2021), (Sari. et al., 2021) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) cenderung lebih rentan terhadap praktik manajemen laba, mengingat kompleksitas operasional yang tinggi serta ketergantungan yang besar terhadap sumber pembiayaan eksternal (Utama & Fitriany, 2019). Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menelusuri bagaimana pengaruh *leverage* dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur. Studi ini mengembangkan penelitian (Janrosl & Lim, 2019) yang meneliti pengaruh GCG terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan dengan variabel Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit pada perusahaan perbankan periode 2016-2018. Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada pergantian variabel kepemilikan manajerial menjadi ukuran dewan direksi serta penambahan variabel audit internal pada perusahaan manufaktur periode 2020-2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada dampak signifikan

pandemi COVID-19 terhadap kondisi keuangan perusahaan manufaktur, yang berpotensi mendorong praktik manajemen laba untuk mempertahankan citra perusahaan di tengah krisis. Selain itu, periode ini juga mencakup masa pemulihan ekonomi pasca pandemi, di mana pengawasan terhadap transparansi keuangan semakin diperketat oleh regulator seperti OJK dan BEI.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *leverage* dan *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengurangi praktik manajemen laba di sektor manufaktur. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Tingkat *Leverage* Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menimbulkan risiko serius terhadap keandalan pelaporan keuangan dan kepercayaan investor. Manajer dapat secara sengaja memodifikasi hasil laporan keuangan baik untuk meningkatkan laba maupun memenuhi target tertentu yang berdampak pada distorsi informasi yang disajikan. Selain itu, variabel tata kelola seperti *leverage* dan mekanisme *Good Corporate Governance* menjadi faktor penting yang perlu diteliti lebih mendalam guna memahami perannya dalam mempengaruhi perilaku manajemen laba.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membatasi fokus pada:

- 1) Pengaruh *leverage* terhadap praktik manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
- 2) Pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap praktik manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
- 3) Analisis akan dilakukan dengan mempertimbangkan komponen-komponen GCG, yaitu komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris independen, auditor internal, komite audit, dan kepemilikan institusional.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
- 2) Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
- 3) Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
- 4) Apakah audit internal berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
- 5) Apakah komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?

- 6) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

- 1) Pengaruh *leverage* terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
- 2) Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
- 3) Pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
- 4) Pengaruh audit internal terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
- 5) Pengaruh komite audit terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
- 6) Pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai manajemen laba, GCG, dan *leverage* dalam konteks Indonesia. Hasil penelitian dapat memperkuat atau menentang teori yang ada, serta memberikan perspektif baru tentang dinamika pasar modal

Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk studi lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba di sektor industri lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan peneliti kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang pengaruh tingkat *leverage* dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur. Selain itu, peneliti dapat mengembangkan keterampilan analisis data dan metodologi penelitian kuantitatif, serta menyusun laporan penelitian yang sistematis. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada topik serupa.

b. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan pemahaman yang berharga bagi investor mengenai kecenderungan praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menelaah peran *leverage* serta mekanisme *Good Corporate Governance*, investor dapat menilai kredibilitas laporan keuangan secara lebih cermat dan mengambil keputusan investasi yang lebih bijak, sehingga mampu mengurangi risiko terhadap manipulasi informasi keuangan.